

Dampak Program Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Ekonomi Warga Miskin: Studi Fenomenologis di Desa Wonggarasi Tengah

Sri Rahma Hanapi^{1*}, Devika Rahayu Daud², Syahputra Adisanjaya Suleman³

¹²³Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Correspondence Author Email: srirahmahanapi@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan di wilayah perdesaan Indonesia, termasuk di Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, masih menjadi tantangan pembangunan yang mendorong pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak positif dan negatif Program BLT terhadap kesejahteraan ekonomi warga miskin di desa tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap delapan informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri atas lima penerima BLT dan tiga informan pendukung dari unsur pemerintah desa. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga kategori dampak positif dan negatif yang ditemukan merupakan hasil kategorisasi tematik atas data lapangan, bukan sekadar deskripsi langsung dari pernyataan informan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program BLT memberikan dampak positif berupa terpenuhinya kebutuhan pokok, berkurangnya beban ekonomi keluarga, meningkatnya daya beli, terbantunya biaya pendidikan dan kesehatan, serta bertambahnya modal usaha kecil bagi sebagian penerima. Namun demikian, ditemukan pula dampak negatif berupa kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan, kecemburuan sosial, ketidaktepatan sasaran, nilai bantuan yang belum mencukupi, serta perbedaan persepsi masyarakat mengenai kelayakan penerima. Dengan demikian, Program BLT efektif meringankan tekanan ekonomi jangka pendek, tetapi belum menjadi solusi utama peningkatan kesejahteraan berkelanjutan sehingga perlu diiringi program pemberdayaan ekonomi produktif.

Kata kunci: BLT, Kemiskinan, Kesejahteraan Ekonomi

Abstract

Poverty in Indonesia's rural areas, including in Wonggarasi Tengah Village, Lemito Sub-district, Pohuwato Regency, remains a development challenge that has prompted the government to distribute Direct Cash Assistance (BLT) through the Village Fund. This study aims to identify the positive and negative impacts of the BLT Program on the economic welfare of poor residents in the village. The research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies involving eight informants selected through purposive sampling, consisting of five BLT recipients and three supporting informants from village government officials. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, so that the categories of positive and negative impacts identified represent the result of thematic categorization of field data, rather than a direct description of informants' statements. Data validity was tested through source and technique triangulation. The results of the analysis show that the BLT Program produced positive impacts, including the fulfillment of basic needs, reduced household economic burdens, increased purchasing power, assistance with education and health costs, and additional business capital for some recipients. However, the study also found negative impacts, including a tendency toward dependency on government assistance, social jealousy among residents, targeting inaccuracies, insufficient assistance amounts, and differing public perceptions regarding beneficiary eligibility. Thus, the BLT Program has proven effective in alleviating short-term economic pressure, but has not yet

become the primary solution for sustainable improvement in community welfare, and therefore needs to be accompanied by productive economic empowerment programs.

Keywords: Direct Cash Assistance, Poverty, Economic Well-Being,

Article History:

Submitted: August 9, 2026

Revised: August 31, 2026

Accepted: September 5, 2026

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu bangsa pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, kesenjangan ekonomi tetap menjadi tantangan struktural yang sulit diurai, terutama di wilayah perdesaan yang aksesnya terhadap sumber daya ekonomi masih terbatas. Secara nasional, angka kemiskinan memang menunjukkan tren penurunan dari 9,36% pada Maret 2023 menjadi 8,57% pada September 2024 (BPS, 2025), tetapi tren agregat ini menyembunyikan disparitas tajam antarwilayah, khususnya di kawasan timur Indonesia yang angka kemiskinannya jauh di atas rata-rata nasional (BPS, 2025). Fenomena inilah yang menjadi titik tolak pentingnya kajian kemiskinan tidak berhenti pada level makro-nasional, melainkan perlu ditelusuri hingga ke unit analisis yang lebih kecil, yaitu desa, tempat kebijakan bersentuhan langsung dengan kehidupan warga miskin.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, pemerintah mengadopsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai instrumen perlindungan sosial berbasis Dana Desa (Peraturan Menteri Desa, PDTT RI Nomor 7 Tahun 2024). Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada individu, dengan asumsi bahwa bantuan tunai memberi otonomi rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas kebutuhannya (World Bank, 2023). Namun, asumsi normatif ini tidak selalu terbukti sederhana di lapangan. Alih-alih hanya menjadi solusi teknis distribusi anggaran, BLT membawa persoalan yang lebih kompleks: bagaimana bantuan tunai yang sifatnya terbatas dan sementara berinteraksi dengan struktur sosial ekonomi lokal, apakah ia benar-benar memperkuat kapabilitas ekonomi rumah tangga miskin, ataukah justru memunculkan persoalan baru seperti ketergantungan dan konflik sosial akibat ketidaktepatan sasaran. Persoalan inilah yang menjadikan efektivitas BLT sebagai isu yang perlu dikaji secara kontekstual, bukan digeneralisasi dari data agregat semata.

Konteks lokal memperkuat urgensi tersebut. Provinsi Gorontalo mencatat kemiskinan 13,24% pada Maret 2025, dengan kesenjangan tajam antara perdesaan (20,80%) dan perkotaan (4,68%) (BPS Provinsi Gorontalo, 2025). Kabupaten Pohuwato, tempat penelitian ini dilakukan, mencatatkan angka kemiskinan 15,24% pada periode yang sama (BPS Kabupaten Pohuwato, 2025), dengan Kecamatan Lemito yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perikanan tradisional dan pertanian skala kecil—dua sektor yang rentan terhadap fluktuasi iklim dan harga pasar. Desa Wonggarasi Tengah, dengan 46 KK penerima BLT pada 2026, merepresentasikan karakteristik masyarakat pesisir-agraris yang selama ini belum banyak menjadi objek kajian dampak BLT secara mendalam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas bantuan tunai, namun dengan fokus dan konteks yang berbeda dari penelitian ini. Khomaini (2020) menyoroti efektivitas BLT dalam kerangka pengukuran makro terhadap penurunan angka kemiskinan, tanpa menelusuri secara mendalam dinamika penerimaan bantuan di level rumah tangga. Rafi'i dkk. (2024) lebih menitikberatkan pada aspek mekanisme penyaluran dan akuntabilitas program, sementara Masese dkk. (2025) mengkaji dampak bantuan tunai pada konteks wilayah dengan struktur ekonomi yang berbeda dari karakteristik pesisir-agraris. Ketiga penelitian tersebut secara konsisten menegaskan bahwa bantuan tunai memberikan manfaat jangka pendek, tetapi belum secara eksplisit memetakan dualisme dampak yakni dampak positif dan negatif secara bersamaan pada masyarakat dengan mata pencaharian informal yang rentan seperti nelayan tradisional dan buruh tani. Kesenjangan (*research gap*) inilah yang mendasari penelitian ini: belum tersedianya kajian kualitatif deskriptif yang secara spesifik mengungkap sisi ganda dampak BLT (manfaat ekonomi sekaligus persoalan sosial yang menyertainya) di wilayah dengan karakteristik seperti Desa Wonggarasi Tengah.

Untuk membedah dualisme dampak tersebut, penelitian ini menggunakan dua lensa teoretis yang saling melengkapi. Pertama, teori kapabilitas dari Sen (1999) digunakan untuk memahami dimensi ekonomi individual: kemiskinan dipandang bukan sekadar rendahnya pendapatan, melainkan hilangnya kapabilitas menjalani kehidupan yang layak, sehingga BLT dianalisis dari sejauh mana ia memulihkan kapabilitas dasar penerima (memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan). Kedua, teori modal sosial dari Coleman (1988) digunakan untuk memahami dimensi relasional-komunal yang tidak tercakup oleh pendekatan kapabilitas: bagaimana jaringan sosial, norma, dan kepercayaan antarwarga di desa turut memengaruhi—dan dipengaruhi oleh—proses penyaluran bantuan. Lensa Coleman ini relevan untuk menjelaskan temuan-temuan seperti kecemburuan sosial dan ketidaktepatan sasaran, yang pada dasarnya merupakan indikasi terkikisnya modal sosial akibat persepsi ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian ini tidak hanya menilai dampak BLT pada level individu/rumah tangga (Sen), tetapi juga pada level relasi sosial komunitas (Coleman) sebuah pendekatan gabungan yang belum banyak digunakan pada penelitian-penelitian BLT sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan ekonomi warga miskin di Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, dengan menggunakan pendekatan gabungan teori kapabilitas dan modal sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan ekonomi warga miskin, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, pengumpulan data melalui triangulasi, analisis bersifat induktif, dan penekanan pada makna, bukan generalisasi (Sugiyono, 2021). Penelitian dilaksanakan di Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato,

Provinsi Gorontalo, selama kurang lebih dua bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan pelaksanaan Program BLT, yaitu lima informan utama penerima BLT dan tiga informan pendukung dari unsur pemerintah desa. Jumlah delapan informan ini tidak dimaksudkan untuk mewakili secara statistik seluruh 96 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa tersebut, melainkan ditentukan berdasarkan prinsip information power dan kejenuhan data (Malterud, Siersma, & Guassora, 2016), yang ditandai dengan berhentinya kemunculan kategori atau tema baru pada wawancara informan keenam hingga kedelapan, sehingga jumlah tersebut dipandang memadai untuk menjawab tujuan penelitian secara mendalam meskipun tidak dimaksudkan sebagai generalisasi.

Peneliti sebagai instrumen utama dibantu dengan pedoman wawancara semiterstruktur yang dikembangkan dari tujuan penelitian, mencakup pemahaman informan mengenai mekanisme dan jadwal penyaluran BLT, pola pemanfaatan dana untuk kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan usaha, perubahan kondisi ekonomi rumah tangga sebelum dan sesudah menerima bantuan, persepsi terhadap ketepatan sasaran dan keadilan penyaluran, dinamika sosial di masyarakat, serta proses pendataan dan pengawasan dari sudut pandang perangkat desa, yang telah melalui konsultasi ahli (expert judgment) sebelum digunakan di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa dan kabupaten, data penerima BLT, profil desa, peraturan perundang-undangan terkait bantuan sosial, serta publikasi Badan Pusat Statistik, yang dikumpulkan melalui observasi terbuka, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui ketekunan pengamatan serta triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi antarinforman dan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), diawali dengan transkripsi verbatim dan pemberian kode terbuka pada satuan makna yang relevan dengan dampak BLT, dilanjutkan dengan kategorisasi kode-kode yang memiliki kemiripan makna, kemudian disintesis menjadi tema-tema utama yang mencerminkan pola dampak positif maupun negatif dari program tersebut. Data yang telah dikategorikan kemudian direduksi dan difokuskan pada tema-tema yang relevan, disajikan dalam bentuk narasi deskriptif disertai kutipan langsung informan, lalu diverifikasi kembali dengan data mentah dan hasil triangulasi untuk memastikan kesimpulan yang ditarik benar-benar didukung oleh data. Keseluruhan tahap ini berlangsung secara siklis, bukan linear, sepanjang proses pengumpulan data hingga penelitian selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini melibatkan delapan orang informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung mereka dengan pelaksanaan Program Bantuan

Langsung Tunai (BLT) di Desa Wonggarasi Tengah. Informan terdiri atas dua kelompok, yaitu informan utama yang merupakan penerima manfaat BLT dan informan pendukung dari unsur pemerintah desa yang memahami proses pendataan dan penyaluran bantuan. Karakteristik masing-masing informan, meliputi inisial, jenis kelamin, umur, jenis informan, serta pekerjaan atau jabatan, disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No	Inisial Informan	Jenis Kelamin	Umur	Jenis Informan	Pekerjaan/Jabatan
1	HJ	L	46 Tahun	Utama	Nelayan
2	FM	P	36 Tahun	Utama	Penjual Kue
3	TK	P	47 Tahun	Utama	Ibu Rumah Tangga
4	SH	P	42 Tahun	Utama	Penjual Makanan
5	DH	P	39 Tahun	Utama	Ibu Rumah Tangga
6	HT	L	56 Tahun	Pendukung	Kepala Desa
7	NA	P	34 Tahun	Pendukung	Sekretaris Desa
8	IT	L	37 Tahun	Pendukung	Kepala Urusan Umum

Berdasarkan Tabel 1, informan penelitian terdiri atas lima informan utama yang merupakan penerima manfaat BLT dengan latar belakang pekerjaan informal (nelayan, pedagang kecil, dan ibu rumah tangga), serta tiga informan pendukung dari unsur pemerintah desa. Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT di Desa Wonggarasi Tengah tercatat sebanyak 96 KPM, sehingga kelima informan utama dipandang telah mewakili keragaman pengalaman penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BLT memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif terhadap kesejahteraan ekonomi warga miskin, sebagaimana diuraikan berikut.

Dampak Positif Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa Program BLT memberikan enam bentuk dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat penerima di Desa Wonggarasi Tengah.

Pertama, membantu memenuhi kebutuhan pokok. Sebagian besar informan menyatakan bahwa dana BLT digunakan untuk membeli beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan dapur lainnya, terutama ketika pendapatan harian tidak mencukupi.

"Kalau saya, uang BLT itu langsung dipakai beli beras, minyak goreng, telur sama kebutuhan dapur. Soalnya penghasilan melaut tidak menentu, kadang dapat ikan banyak, kadang juga pulang kosong." (HJ, Wawancara, 2026)

Kepala Desa Wonggarasi Tengah menguatkan temuan ini dengan menjelaskan bahwa mayoritas penerima memanfaatkan bantuan sesuai tujuan program karena penghasilan mereka yang tidak tetap. Temuan ini sejalan dengan fungsi BLT sebagai

instrumen konsumtif yang menjaga ketahanan pangan rumah tangga miskin (Sumodiningrat, 2023).

Kedua, meringankan beban ekonomi keluarga. Tambahan dana BLT membuat keluarga tidak sepenuhnya bergantung pada pendapatan utama yang tidak menentu, bahkan mengurangi kebiasaan berutang saat menghadapi kebutuhan mendesak.

"Kalau belum ada BLT, kadang saya harus pinjam dulu di tetangga atau di warung kalau kebutuhan mendadak. Sekarang kalau pas bantuan cair, setidaknya tidak langsung pinjam karena masih ada uang yang bisa dipakai." (TK, Wawancara, 2026)

Ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli tidak dimaknai sebagai konsumsi berlebihan, melainkan bertambahnya kemampuan rumah tangga membeli kebutuhan yang sebelumnya tertunda akibat keterbatasan pendapatan, seperti perlengkapan sekolah anak atau kebutuhan dapur dalam jumlah lebih memadai.

"Waktu BLT cair, kami bisa membeli kebutuhan yang sebelumnya belum sempat dibeli, seperti beras, ikan asin, minyak goreng, bahkan kadang beli gas elpiji. Jadi bantuan itu membuat kami tetap bisa belanja walaupun penghasilan sedang tidak ada." (HJ, Wawancara, 2026)

Keempat, membantu biaya pendidikan dan kesehatan. Meskipun BLT tidak menyalurkan dana ke sektor pendidikan atau kesehatan secara khusus, dana tersebut memberi kemampuan finansial bagi keluarga untuk mengakses kedua kebutuhan itu, sehingga manfaatnya bersifat tidak langsung (indirect impact) namun tetap signifikan bagi keberlangsungan pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan kesehatan keluarga.

"Kadang sisa uang BLT saya pakai juga untuk beli buku atau bayar keperluan sekolah anak, atau kalau ada yang sakit ringan, jadi tidak perlu pinjam ke tetangga dulu." (SH, Wawancara, 2026)

Hasil observasi di lapangan turut menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga penerima mengalokasikan sisa dana BLT untuk kebutuhan non-pangan tersebut pada minggu-minggu awal setelah pencairan, meskipun proporsinya relatif kecil dibandingkan alokasi untuk kebutuhan pokok.

Kelima, menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. BLT berperan sebagai instrumen yang membantu keluarga mempertahankan keberlangsungan konsumsi dan mengurangi risiko krisis ekonomi rumah tangga saat sumber penghasilan utama menurun, sehingga memberikan rasa aman secara ekonomi bagi keluarga penerima.

"Selama saya bertugas, saya melihat rumah tangga yang rutin menerima BLT relatif lebih stabil kondisinya dibanding yang belum terdata, terutama pada musim paceklik atau saat harga kebutuhan pokok naik." (HT, Wawancara, 2026)

Keenam, menambah modal usaha kecil. Bagi sebagian kecil informan yang memiliki usaha mikro, seperti berjualan kue atau makanan, sebagian dana BLT dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha sehingga usaha tetap dapat berjalan dan menjadi sumber pendapatan tambahan keluarga.

"Sebagian uang BLT saya putar lagi untuk beli bahan kue, jadi dagangan saya tidak sampai berhenti walaupun modal sedang menipis." (FM, Wawancara, 2026)

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa Program BLT telah berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang efektif mempertahankan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, sejalan dengan tujuan pergeseran kebijakan subsidi langsung kepada rumah tangga (World Bank, 2023). Meskipun demikian, manfaat BLT tidak dirasakan secara seragam karena dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga, dan prioritas kebutuhan masing-masing rumah tangga.

Dampak Negatif Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Selain memberikan manfaat, pelaksanaan Program BLT juga menyisakan lima dampak negatif yang merupakan konsekuensi dari dinamika implementasi program di tingkat desa, bukan indikasi kegagalan program itu sendiri.

Pertama, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Sebagian penerima mulai memperhitungkan BLT sebagai salah satu sumber pendapatan tetap dan menyesuaikan pengeluaran rumah tangga dengan jadwal pencairan bantuan. Ketergantungan ini bersifat fungsional, bukan absolut, namun berpotensi meningkat apabila tidak diimbangi program pemberdayaan ekonomi.

"Kadang saya baru belanja besar kalau sudah dekat jadwal pencairan BLT, jadi memang sudah diperhitungkan dalam pengeluaran bulanan keluarga." (DH, Wawancara, 2026)

Kedua, kecemburuan sosial antarwarga. Perbedaan status penerima memunculkan pertanyaan dan perbandingan kondisi ekonomi antarwarga, meskipun umumnya tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

"Waktu awal-awal penyaluran memang ada beberapa tetangga yang sering bertanya kenapa saya dapat BLT, sementara mereka tidak dapat. Saya biasanya hanya menjelaskan kalau penentuan penerima bukan dari saya, tetapi berdasarkan data dari pemerintah." (SH, Wawancara, 2026)

Ketiga, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Perubahan status ekonomi masyarakat yang berlangsung dinamis, sementara pemutakhiran data belum selalu mengikuti perubahan tersebut, memunculkan persepsi bahwa sebagian penerima kurang tepat sasaran.

"Data yang kami pakai memang tidak selalu diperbarui setiap tahun, jadi ada kondisi warga yang sudah membaik secara ekonomi tetapi masih tercatat sebagai penerima, dan sebaliknya ada yang sudah layak tapi belum masuk data." (NA, Wawancara, 2026)

Keempat, nilai bantuan belum mencukupi kebutuhan. Nominal BLT yang diterima dinilai hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu singkat, terlebih dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan jumlah tanggungan keluarga yang besar.

"Kalau menurut saya bantuan itu memang sangat membantu, tetapi jumlahnya masih belum cukup. Baru dipakai beli beras, minyak, gula, sama kebutuhan dapur lainnya sudah hampir habis." (DH, Wawancara, 2026)

Kelima, perbedaan persepsi mengenai kelayakan penerima. Sebagian masyarakat menilai masih terdapat warga yang dianggap layak menerima bantuan namun belum terdata sebagai KPM, sehingga menimbulkan perasaan kurang adil di lingkungan sekitar.

"Ada juga warga yang datang ke kantor desa untuk menanyakan kenapa mereka belum masuk daftar penerima, padahal menurut mereka kondisi ekonominya tidak jauh berbeda dengan yang sudah terdata." (IT, Wawancara, 2026)

Perspektif teori pilihan rasional Coleman (1990) relevan untuk memahami dinamika ini, karena setiap aktor, baik masyarakat penerima, masyarakat yang belum menerima, maupun pemerintah desa, bertindak berdasarkan kepentingan dan sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, dampak negatif yang ditemukan perlu direspons melalui pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala, peningkatan transparansi, serta pengintegrasian BLT dengan program pemberdayaan ekonomi agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, sejalan dengan temuan Hastuti et al. (2024) bahwa efektivitas bantuan tunai di perdesaan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pendampingan ekonomi bagi penerima manfaat.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Program BLT di Desa Wonggarasi Tengah memberikan dampak yang bersifat dua arah, yaitu dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas ekonomi rumah tangga miskin, serta dampak negatif berupa ketergantungan dan persoalan ketepatan sasaran. Pola ini konsisten dengan karakteristik pekerjaan informan utama yang sebagian besar bergerak di sektor informal, seperti nelayan, pedagang kecil, dan ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap. Ketidakpastian pendapatan harian inilah yang menjelaskan mengapa dana BLT cenderung digunakan untuk konsumsi pangan segera (kebutuhan pokok) dan sebagai penyangga saat pendapatan utama menurun, sebagaimana terlihat pada pola pengeluaran HJ dan TK. Kondisi ini sejalan dengan teori perlindungan sosial yang memposisikan bantuan tunai sebagai instrumen penyangga (buffer) bagi rumah tangga dengan pendapatan tidak menentu, sehingga dana tersebut lebih banyak berfungsi konsumtif jangka pendek dibandingkan sebagai modal produktif jangka panjang (Sumodiningrat, 2023).

Dampak pada aspek pendidikan, kesehatan, dan permodalan usaha mikro yang bersifat tidak langsung (indirect impact) dapat dijelaskan melalui logika residual income, yaitu manfaat tambahan yang muncul setelah kebutuhan pokok terpenuhi dan masih tersisa dana yang dapat dialokasikan. Karena nilai BLT relatif terbatas, manfaat pada aspek ini cenderung dirasakan pada skala kecil dan tidak merata antarpenerima, tergantung pada jumlah tanggungan keluarga dan jenis usaha yang dijalankan, seperti terlihat pada perbedaan pemanfaatan antara FM yang memiliki usaha kue dan informan lain yang tidak memiliki usaha sampingan. Temuan ini memperkuat pandangan World Bank (2023) bahwa pergeseran kebijakan menuju bantuan tunai langsung efektif menjaga daya beli rumah tangga miskin, namun sekaligus

menegaskan keterbatasannya sebagai instrumen tunggal untuk mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak negatif yang ditemukan, khususnya ketergantungan terhadap jadwal pencairan dan kecemburuan sosial, dapat dipahami melalui teori pilihan rasional Coleman (1990). Ketika penyaluran BLT bersifat rutin dan dapat diprediksi, penerima secara rasional menyesuaikan pola pengeluaran rumah tangga dengan jadwal pencairan karena hal tersebut merupakan strategi yang paling efisien untuk mengelola sumber daya yang terbatas, bukan semata cerminan sikap pasif atau malas berusaha. Demikian pula, kecemburuan sosial yang dialami SH muncul karena warga yang tidak menerima bantuan menilai kepentingan dan haknya belum terpenuhi secara adil, sehingga mereka mempertanyakan dasar penentuan penerima kepada aktor yang dianggap memiliki informasi, dalam hal ini informan penerima maupun pemerintah desa. Persoalan ketidaktepatan sasaran dan perbedaan persepsi kelayakan pada dasarnya bersumber dari kesenjangan antara dinamika kondisi ekonomi masyarakat yang berubah cepat dengan pembaruan basis data penerima yang berlangsung lebih lambat, sebuah persoalan struktural yang juga banyak ditemukan pada program bantuan sosial berbasis data di berbagai daerah lain.

Dibandingkan dengan penelitian Hastuti et al. (2024), temuan ini menunjukkan kesamaan pada aspek pentingnya pendampingan ekonomi agar manfaat bantuan tunai tidak berhenti pada fungsi konsumtif semata, sehingga rumah tangga penerima dapat bertransisi ke aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Namun demikian, penelitian ini juga memperlihatkan perbedaan konteks, yaitu skala desa yang lebih kecil dengan struktur mata pencaharian yang didominasi sektor perikanan dan perdagangan mikro, sehingga pola pemanfaatan BLT yang ditemukan lebih terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan pangan harian dibandingkan pada penelitian di wilayah dengan diversifikasi ekonomi yang lebih luas. Perbedaan ini menegaskan bahwa efektivitas dan dampak Program BLT bersifat kontekstual, sehingga strategi pendampingan dan pemutakhiran data penerima perlu disesuaikan dengan karakteristik mata pencaharian dan kondisi sosial ekonomi masing-masing wilayah.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa dampak positif dan negatif Program BLT bukan dua fenomena yang terpisah, melainkan dua sisi dari mekanisme yang sama, yaitu penyaluran bantuan tunai rutin kepada rumah tangga dengan pendapatan tidak menentu. Implikasinya, keberlanjutan manfaat BLT ke depan sangat bergantung pada tiga hal, yaitu pemutakhiran data penerima secara berkala, peningkatan transparansi proses pendataan kepada masyarakat, serta pengintegrasian BLT dengan program pemberdayaan ekonomi produktif, sehingga bantuan tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang bagi warga miskin di Desa Wonggarasi Tengah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program BLT di Desa Wonggarasi Tengah berfungsi sebagai instrumen penyangga (buffer) yang efektif menjaga kemampuan

konsumsi dan stabilitas ekonomi rumah tangga miskin berpendapatan tidak menentu, namun sekaligus melahirkan bentuk ketergantungan fungsional dan persoalan ketepatan sasaran yang bersumber dari kesenjangan antara dinamika kondisi ekonomi masyarakat dan lambatnya pemutakhiran data penerima. Dengan kata lain, dampak positif dan negatif yang ditemukan bukan dua fenomena terpisah, melainkan dua sisi dari satu mekanisme yang sama, yaitu penyaluran bantuan tunai rutin tanpa disertai pendampingan ekonomi yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa BLT efektif sebagai jaring pengaman sosial jangka pendek, tetapi belum cukup untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan apabila tidak diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi produktif, pemutakhiran data penerima secara berkala, dan peningkatan transparansi proses pendataan di tingkat desa. Implikasinya bagi kebijakan perlindungan sosial, efektivitas program bantuan tunai ke depan perlu diukur tidak hanya dari ketepatan penyaluran, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi penerima manfaat, bukan sekadar bantuan yang berulang tanpa arah keluar (*exit strategy*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo atas dukungan akademik selama penelitian berlangsung, kepada Pemerintah Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato yang telah memberikan izin dan memfasilitasi proses pengumpulan data, serta kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi selama proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil kemiskinan di Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/kemiskinan-2025>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato. (2025). *Kabupaten Pohuwato dalam angka 2025*. BPS. <https://pohuwatokab.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2025). *Provinsi Gorontalo dalam angka 2025*. BPS.
- Coleman, J. S. (1990). *Foundations of social theory*. Harvard University Press.
- Dg. Masese, N. F. Z., Usman, R., Zahra, F., & Bakry, M. I. (2026). Analisis dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 15(1), 86–95. <https://doi.org/10.22437/jmk.v15i01.52604>
- Hastuti, H., Maxwell, J., & Widjajanti, R. (2024). Efektivitas program bantuan tunai dalam menanggulangi kemiskinan di perdesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(1), 45–58.
- Khomaini, A. A. (2020). Dampak program bantuan tunai (cash transfer) terhadap kesejahteraan subyektif di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 5(1), 1–18.
- Lestari, A. P., & Presetyo, K. B. (2025). Analisis kemanfaatan program BLT terhadap kesejahteraan sosial masyarakat penerima bantuan. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 14(1).
- Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. *Qualitative Health Research*, 26(13), 1753–1760. <https://doi.org/10.1177/1049732315617444>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Desa Wonggarasi Tengah. (2025). *Profil desa dan kelurahan (Prodeskel) tahun 2025*. Kantor Desa Wonggarasi Tengah.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. (2024). Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Rafi, R., Mahmud, M., Sudirman, S., Hasiru, R., Damiti, F., & Kasim, M. (2024). Pengaruh Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Palasa Lambori. *Journal of Economic and Business Education*, 2(2), 77–88. <https://doi.org/10.37479/jebe.v2i2.24982>
- Rauf, H. (2025). *Data penerima BLT disesuaikan setiap tahun*. RRI. <https://rri.co.id/pengentasan-kemiskinan/1774324/data-penerima-blt-disesuaikan-setiap-tahun/>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (2023). *Mewujudkan kesejahteraan rakyat: Analisis kebijakan perlindungan sosial di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- World Bank. (2023). *The state of social safety nets 2023*. World Bank Group.